

ABSTRAK

SUPRIANTO, Nim S 311602011, **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Di Kabupaten Ngawi**, TESIS: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penyebab diperlukan pengaturan kebijakan tentang perangkat daerah dalam sistem pemerintah daerah; (2) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai; (3) untuk mengetahui pengaturan kebijakan tentang perangkat daerah yang ideal agar dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawai sekretariat DPRD di Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Hukum dikonsepkan sebagai pola-pola perilaku yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik dengan mengambil lokasi penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif, dan interpretatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan kebijakan tentang perangkat daerah dalam sistem pemerintah daerah ditinjau dari komponen struktur hukum adalah Bupati atau Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Secara substansi hukum, pengaturan tentang perangkat daerah masih diperlukan karena pemerintah daerah membutuhkan acuan yang jelas dalam menyusun organisasi perangkat daerah. Ditinjau dari komponen budaya hukum, pengaturan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat agar tidak ada kerancuan dari masyarakat dalam mengakses implementasi kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (2) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi, ditinjau dari struktur hukum adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian. Ditinjau dari substansi hukum pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 51 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A. Ditinjau dari unsur kultur hukum, kompetensi pegawai yang pindah dari adanya penggabungan Dinas dan Badan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tidak sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi. (3) Pengaturan kebijakan tentang perangkat daerah yang ideal agar dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi ditinjau dari struktur hukum adalah penetapan kebijakan pemberian wewenang kepada Sekretaris DPRD untuk memberi penghargaan materiil kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan. Ditinjau dari substansi hukum adalah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) sehingga pegawai dapat bekerja lebih optimal. Ditinjau dari unsur kultur hukum adalah penetapan kebijakan tentang pemberian motivasi materiil kepada pegawai.

Kata Kunci : implementasi kebijakan publik, efektivitas kinerja pegawai

ABSTRACT

SUPRIANTO, Nim S 311602011, IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 18 YEAR 2016 ABOUT REGIONAL DEVICE TO THE EFFECTIVENESS OF PERFORMANCE OF STAFF OF DPRD SECRETARIAT IN NGAWI DISTRICT, THESIS: Postgraduate Program Sebelas Maret University of Surakarta, 2017.

This study aims to (1) to find out the causes of policy arrangements on regional apparatus in the local government system; (2) to know the Implementation of Government Regulation Number 18 Year 2016 in increasing the effectiveness of employee performance; (3) to know the policy arrangement about the ideal regional device in order to improve the performance effectiveness of the secretariat staff of DPRD in Ngawi Regency.

This research is included in sociological law research. The law is conceptualized as institutionalized patterns of behavior, exists as an empirical social variable by taking the research location in the Secretariat of the Ngawi District Parliament. Data collection was done by interview and documentary to obtain primary data and secondary data. The data analysis uses descriptive qualitative, and interpretative.

The results of the research indicate that (1) the policy arrangement on the regional apparatus in the local government system in terms of the legal structure component is the Regent or Mayor, Governor and Minister of Home Affairs. Substantively, the regulation of regional apparatus is still needed because the local government needs a clear reference in preparing the regional apparatus organization. Viewed from the legal culture component, the regulation is needed by the community so that there is no confusion from the public in accessing the implementation of policies from the central government and local government. (2) Implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 in improving the effectiveness of the performance of the Secretariat staff of Ngawi Regency DPRD, in terms of the legal structure is the Secretary of Ngawi Regency DPRD, Head of Section and Head of Sub Division. Judging from the legal substance of the government of Ngawi Regency has stipulated Regulation of Ngawi Regent Number 51 Year 2016 regarding Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Working Procedure of the Secretariat of Type A Regional House of Representatives Judging from the element of legal culture, the competence of employees who moved from the merger of Dinas and Other bodies in accordance with Government Regulation No. 18 of 2016 are not in accordance with the needs of the Secretariat of Ngawi Regency DPRD. (3) Regulating the policy of the ideal regional apparatus in order to improve the effectiveness of the performance of the staff of the Ngawi Regency DPRD Secretariat in terms of the legal structure is the determination of the authority granting authority to the Secretary of the DPRD to award material rewards to outstanding employees and sanctions against employees who violate regulations. Judging from the substance of the law is to set standard operating procedure (SOP) so that employees can work more optimally. Judging from the element of legal culture is the determination of the policy on the provision of material motivation to employees.

Keywords: public policy implementation, employee performance effectiveness